

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul *Bait al -Mal wa al-Tamwil* (BMT) Barokah Padi Melati dalam Memberdayakan Masyarakat Miskin di Wirobrajan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan menghindari dari salah pengertian serta memperjelas istilah pokok, maka penulis memandang perlu memberikan penegasan judul yaitu sebagai berikut :

1. *Bait al-Mal wa al- Tamwil* (BMT)

Menurut istilah *Bait al- mal wa al-Tamwil* (BMT) merupakan suatu wadah atau intitusi keuangan formal yang dijalankan menurut syariah Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dan memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang priduktif dan menguntungkan.¹

Bait al-Mal wa al-Tamwil ini berdiri dari dua lembaga yaitu *Bait al-Mal* dan *Bait al-Tamwil*. *Bait al-Mal* adalah lembaga menghimpun dana masyarakat dalam bentuk zakat, infaq, sodaqoh (ZIS) dan hibah, sedang *Bait al-tamwil* adalah menghimpun dana masyarakat kemudian digunakan untuk pembiayaan produktif anggota.

Dalam judul skripsi di atas, penulis mengambil lokasi penelitian di *Bait al-Mal wa al -Tamwil* (BMT) yang bernama Barokah Padi Melati, di namakan Padi Melati gabungan antara lambang Pemuda Muhammadiyah dan

¹Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil, *Model Penelitian Baitut Tamwil* (Jakarta: PINBUK t.,th.), hal.16

Nasyiatul Aisyiah yaitu padi melambangkan Nasyiatul Aisyiah sedangkan Melati lambang Pemuda Muhammadiyah sehingga di namakan Padi Melati. Lembaga ini berlokasi Jalan Bugisan No 21, Patang Puluhan, Wirobrajan, Yogyakarta. Penelitian ini mengkaji bagian tamwilnya.

2. Memberdayakan

Secara etimologi memberdayakan berasal dari kata “berdaya” yang berarti berkekuatan, berkemampuan, bertenaga atau mempunyai akal (cara melihat dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu. Memberdayakan berarti sesuatu kegiatan agar seseorang mempunyai kekuatan atau kemampuan dalam mengatasi segala sesuatu yang dihadapi.²

Dalam definisi lain, sebagaimana yang di kemukakan oleh Sahal Mahfudh, pemberdayaan rakyat atau pengembangan masyarakat adalah proses dari serangkaian kegiatan yang mengarah kepada peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat.³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah proses dari serangkaian kegiatan yang berusaha menumbuhkan kekuatan, kemampuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Proses tersebut mengandung kegiatan yang diharapkan dapat mengubah sikap, gaya hidup, pola pikir serta meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat.

² Tim Pusat Kamus Pusat Balai Penelitian Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal.189

³ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta : LKIS dan Pustaka Pelajar, 1994), hal.109

3. Masyarakat Miskin

a. Masyarakat

Masyarakat menurut W.J.S Porwadarminto sebagaimana dikutip A.W. Widjaja adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan- ikatan tertentu). Masyarakat adalah sekelompok orang yang mempunyai identitas sendiri, yang membedakan dengan kelompok lain, dan hidup dan diam dalam wilayah tertentu secara tersendiri. (PN Balai Pustaka 1982,hal.636)⁴

b. Miskin

Miskin mengandung pengertian tidak mempunyai apa –apa (Harta yang di makan)⁵

Miskin adalah keadaan yang menyedihkan dan menderita bagi orang miskin patut dikasihani dengan cara memberi sedekah dan bantuan oleh mereka yang lebih baik taraf hidupnya.⁶

Jadi yang disebut Masyarakat Miskin adalah Masyarakat yang paling lemah sehingga tidak memiliki kekuatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan standard kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam hal ini kriteria masyarakat miskin di wilayah kecamatan Wirobrajan yang dapat mengambil pembiayaan (pinjaman) menurut pengurus BMT Barokah Padi Melati yaitu Fakir Miskin (keluarga dan anak – anak terlantar), kelompok Informal (kaki lima, asongan), kelompok pekerja kasar

⁴ A.W. Widjaja, *Manusia Individu, Keluarga dan Masyarakat Topik-Topik Kumpulan Bahan Bacaan Mata Kuliah Ilmu Sosial Dasa* (Jakarta : Akademika Presindo,1986),hal.6

⁵ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kartika, 1997),hal.370

⁶ A.W. Widjaja, *op.cit.*,hal.134

(kuli), pelajar-pelajar yang merantau di wilayah Wirobrajan yang terlambat pengirimannya dari orang tua berdasarkan survey pengurus. Selain itu, memiliki identitas jelas, jujur, dalam artian mempunyai Akhlak baik, dengan catatan dana yang diberikan tersebut dialokasikan untuk mendirikan usaha (bagi yang belum punya usaha) dan untuk mengembangkan usahanya (bagi yang sudah punya usaha) untuk meningkatkan perekonomian mereka dan dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Dalam uraian di atas yang dimaksud dalam judul *Bait al-Mal wa al-Tamwil* Barokah Padi Melati dalam memberdayakan masyarakat miskin di Wirobrajan dalam penelitian ini adalah suatu usaha dari lembaga *Bait al-Mal al wa-Tamwil* (BMT) Barokah Padi Melati di kecamatan Wirobrajan dalam penyediaan dana sebagai sarana dakwah dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin di Wirobrajan.

B. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap manusia, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud jika para anggotanya hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena kemiskinan merupakan salah satu bentuk ketidaksejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan ekonomi.

Kemiskinan sebagai suatu kondisi serba kurang dalam pemenuhan ekonomi berimplikasi jamak kepada kehidupan seseorang atau suatu masyarakat. Oleh karena itu kegiatan pembangunan yang diselenggarakan di berbagai negara pada

hakekatnya dimaksudkan antara lain untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Pembangunan Jangka Panjang (PJP I) Indonesia telah berhasil menaikkan pendapatan perkapita menjadi US\$ 650, meskipun masih terdapat kurang lebih 27 juta jiwa masyarakat masih hidup di bawah *poverty line* (garis kemiskinan). Hal ini berarti pembangunan pada masa-masa yang akan datang juga mengemban suatu misi yaitu mengentaskan 27 juta jiwa masyarakat Indonesia itu dari kemiskinan.⁷

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah pembangunan masyarakat. Dalam pembangunan ekonomi akan banyak ditampilkan masalah-masalah kemasyarakatan terutama yang menyangkut nilai-nilai masyarakat Indonesia itu dari kemiskinan.

Gambaran mengenai kemiskinan di Indonesia tidak menggembirakan. Kemiskinan yang ada cukup massive. Kemiskinan ini merupakan kemiskinan struktural sebagai akibat terbentuknya suatu struktur sosial yang mengakibatkan golongan masyarakat tertentu tidak mampu produktif dalam kehidupan ekonominya. Ketidakmampuannya berpotensi produktif ini erat hubungannya dengan hal-hal yang ada di sekitar masalah-masalah pemilikan dan penguasaan faktor-faktor produksi baik yang sifatnya material maupun yang non-material (spiritual).

Sikap ajaran Islam sangat jelas dan tegas terhadap masalah kemiskinan ini merupakan suatu masalah yang bisa membahayakan aqidah, moral dan akhlak.

⁷ Yusuf al Qordhawi, diterj. Oleh Syafril halim *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insan Press, 1995), hal. 5

Berdasarkan fakta itulah maka sangat perlu, bahkan mendesak, untuk segera mewujudkan unit usaha muslim yang dapat memenuhi kebutuhan atau hajat hidup umat Islam pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Karena Islam tidak cukup untuk hanya didakwahkan dengan media lisan saja, seperti dakwah sekarang ini yang masih cenderung menggunakan metode ceramah, diskusi dan lain sebagainya, yang sebenarnya saat ini kurang efektif dilaksanakan dan lebih dibutuhkan oleh umat Islam. Seperti misalnya dengan memberikan bantuan berupa dana maupun jasa yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peningkatan ekonomi yang pada akhirnya akan berdampak pada keberhasilan dalam memberdayakan masyarakat miskin sehingga masyarakat di Wirobrajan menjadi berkembang dalam hal ekonominya.

Dengan diketahuinya kemiskinan di Indonesia yang cukup tinggi maka BMT Barokah Padi Melati mencoba untuk mengupayakan peningkatan dan pengembangan perekonomian.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BMT Barokah Padi Melati disamping bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat juga sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah, sehingga apabila ditinjau dari segi dakwah, lembaga ini merupakan alat untuk mencapai tujuan dakwah yang sebenarnya.

Dengan berdirinya BMT Barokah Padi Melati tersebut, ternyata mendapat sambutan dalam upaya meningkatkan perekonomian umat, dengan adanya BMT Barokah Padi Melati dalam mengembangkan perekonomian umat dan berusaha berperan aktif di dalam memberdayakan masyarakat miskin, karena betapa

bahayanya apabila kemiskinan tidak cepat-cepat diatasi. Penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai sejauh mana dakwah bidang ekonomi oleh BMT Barokah Padi Melati dalam memberdayakan masyarakat miskin di Wirobrajan dalam mengembangkan perekonomian sekaligus memberikan manfaat bagi umat Islam khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah yang menjadi titik tekannya dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pemberdayaan yang dilakukan BMT Barokah Padi Melati terhadap Masyarakat Miskin di Wirobrajan?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan tentang BMT Barokah Padi Melati dalam memberdayakan masyarakat miskin di Wirobrajan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terutama bagi jurusan Pengembangan Masyarakat Islam utamanya wawasan pengembang masyarakat dari aspek ekonomi.

2. Kegunaan Praktis

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan acuan data awal untuk mendapatkan data-data lainnya yang komprehensif di dalam penelitian masalah yang sama yang ada dalam penelitian ini.

b. Bagi BMT Barokah Padi Melati

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan bagi pihak BMT Barokah Padi Melati dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan.

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin

a. Pemberdayaan atau Empowerment

Kata *power* dalam *empowerment* diartikan daya sehingga *empowerment* diartikan sebagai pemberdayaan. Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam, tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar.⁸ Pemberdayaan merupakan sebuah konsep untuk memotong lingkaran setan yang menghubungkan *power* dengan pembagian kesejahteraan. Keterbelakangan masyarakat disebabkan karena ketidakseimbangan dalam kepemilikan atau akses pada sumber-sumber kekuasaan. Proses yang panjang menyebabkan terjadinya peniadaan kekuasaan pada sebagian besar masyarakat, akibatnya masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap akses produktif yang umumnya dikuasi oleh masyarakat yang memiliki kekuasaan.

⁸ Onny S. Prijono, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta, CSIS.1996), hal.135

Pemberdayaan mempunyai dua tujuan yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan serta memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Dua tujuan ini merupakan sasaran dari upaya pemberdayaan.⁹

Upaya pemberdayaan masyarakat miskin dilihat dari tiga sisi yaitu :

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Disini titik tolaknya adalah setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, menciptakan potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan meliputi langkah –langkah nyata dan menyangkut persediaan sebagai masukan serta pembukuan akses kedalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat makin menjadi berdaya untuk itu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyetuh lapisan masyarakat itu.

⁹ Ginanjar Kartasasmita, *Power dan Empowerment : Sebuah Telaah Mengenai Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta : Gramedia, 1986), hal. 8

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah yang menjadi bertambah lemah oleh kurang berdayaannya dalam menghadapi yang kuat.

Pendekatan utama dalam konsep dalam pemberdayaan adalah bahwa masyarakat dijadikan obyek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan itu sendiri. Berdasarkan konsep demikian dikembangkan berbagai pendekatan. Pertama-tama upaya pemberdayaan masyarakat harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya sesuai dengan kebutuhannya. Karena dasarnya adalah kepercayaan kepada rakyat, maka program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang akan menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan dan mengelola serta mempertanggung jawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Selanjutnya harus menggunakan pendekatan kelompok karena secara sendiri-sendiri warga masyarakat yang kurang berdaya sulit untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Karena organisasi adalah salah satu sumber power yang penting, maka untuk *empowerment*, pengorganisasian masyarakat ini menjadi penting sekali. Pendekatan kelompok juga paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

b. Pemberdayaan Sebagai Konsep Budaya

Tampak pada uraian di atas, bahwa pemberdayaan bukan hanya konsep ekonomi atau hanya konsep politik. Pemberdayaan adalah konsep yang menyeluruh atau holistik. Ia menyangkut nilai-nilai dalam masyarakat. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya melalui pemberdayaan diharapkan akan meningkat bukan hanya ekonominya melainkan juga harkat, martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya. Dengan demikian, dapatlah diartikan bahwa pemberdayaan tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada program-program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atau usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah masyarakat dan membangun kemampuan untuk memajukan diri kearah kehidupan yang lebih baik secara sinambung. Memberdayakan dapat diartikan sebagai kemampuan power atau daya.

Oleh karena itu pemberdayaan menyangkut perubahan bukan hanya kemampuan, melainkan juga sikap, maka pemberdayaan adalah sebuah konsep kebudayaan. Menurut pandangan itu bahwa maka pemberdayaan masyarakat tidak hanya menghasilkan emansipasi ekonomi dan politik masyarakat di lapisan bawah tetapi juga wahana transformasi budaya. Melalui pemberdayaan, masyarakat akan memiliki keyakinan yang lebih besar akan kemampuan yang

dirinya. Ia tidak lagi harus menyerah kepada nasib, bahwa kemiskinan adalah bukan takdir yang tidak dapat diatasi.

Pemberdayaan masyarakat akan membawa masyarakat ke dalam zaman baru memasuki kehidupan modern. Ia akan meninggalkan kebiasaan dan nilai-nilai lama (tradisional negatif) yang tidak relevan dan menghambat kemajuan kehidupannya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, disiplin, keterbukaan dan bertanggung jawab adalah bagian pokok upaya pemberdayaan ini. Pemberdayaan masyarakat membuka pintu pada proses akulturasi yaitu perpaduan nilai-nilai baru dengan nilai-nilai lama yang menggambarkan jati diri. Nilai lama yang relevan dapat dipertahankan, karena diyakini tidak perlu mengganggu proses modernisasi yang berlangsung dalam dirinya.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu warga masyarakat, melainkan juga pranata-pranatanya. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peran masyarakat di dalamnya. Melalui proses budaya itu pula keberdayaan masyarakat akan diperkuat dan diperkaya pula aksesnya kepada sumber power. Melalui proses itu, maka akan tercipta masyarakat yang berkeadilan, karena konstelasi kekuasaan sudah dibangun diatas landasan pemerataan.

Demikianlah, sebuah uraian mengenai pemberdayaan atau empowerment sebagai konsep pembangunan yang mencoba memecahkan masalah pembangunan untuk menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya lembaga keuangan BMT.

c. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yaitu yang bersifat *people centered, participatory, empowering and sustainable* seperti dikatakan Robert Chamber.¹⁰

Dalam pemberdayaan masyarakat setidaknya ada dua macam perspektif yang relevan untuk mendekati persoalan pemberdayaan masyarakat (terutama masyarakat miskin) agar lebih memiliki akses pada pelayanan yaitu

- 1) perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada alokasi sumber daya (*resource allocation*)
- 2) Perspektif yang memfokuskan perhatiannya pada penampilan kelembagaan.

Asumsi yang pertama mereka dikembangkan berbeda. Dalam perspektif yang pertama, ketidakberdayaan kelompok miskin dianggap sebagai akibat dari (atau sekurang-kurangnya berkaitan dengan) sindrom kemiskinan yang rekat melekat pada kehidupan kelompok miskin itu sendiri. Sedangkan dalam perspektif yang kedua, ketidakberdayaan itu dianggap sebagai konsekuensi dari bentuk pengelolaan pelayanan yang diskriminatif (hanya menguntungkan kelompok kaya dan merugikan kelompok miskin).¹¹

Setiap perencanaan pembangunan yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat paling tidak harus memuat unsur-unsur pokok sebagai berikut : pertama, strategi dasar pemberdayaan masyarakat yang merupakan acuan dari

¹⁰ *Ibid.*, hal. 8

¹¹ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 21

seluruh upaya pemberdayaan masyarakat. Kedua, kerangka makro pemberdayaan masyarakat yang memuat berbagai besaran sebagai sasaran yang harus dicapai. Ketiga, sumber anggaran pembangunan sebagai perkiraan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Keempat, kerangka dan perangkat kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat. Kelima, program-program pemberdayaan masyarakat yang secara konsisten diarahkan pada pengembangan kapasitas masyarakat. Keenam, indikator keberhasilan program yang memuat perangkat pencatat sebagai dasar pemantauan evaluasi program dan penyempurnaan program serta kebijaksanaan yang menjamin kelangsungan program dan penyempurnaan program serta kebijaksanaan yang menjamin kelangsungan program.¹²

2. Tinjauan Pengentasan Kemiskinan

a. Pengentasan Kemiskinan

Karena problema kemiskinan bersifat multi-dimensional, maka strategi penanggulangannya juga harus bersifat multidimensional saja. Selama ini yang dilakukan oleh pemerintah hanyalah bersifat ekonomi semata sehingga apabila kebutuhan ekonomi sudah tercapai seolah-olah proyek penanggulangan kemiskinan itu juga ikut selesai. Ini berarti menenggelamkan persoalan-persoalan kemiskinan yang tidak berdimensi ekonomi seperti kemiskinan struktural atau politisi. Untuk itu ada beberapa langkah yang perlu diperhitungkan dalam pemberdayaan lapisan masyarakat miskin.¹³

¹² Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan dan Jaringan Pengaman Sosial* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hal. 129

¹³ Heru Nugroho, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia dalam Awam Setya Dewatara*(Ed)*Kemiskinan, Ketimpangan, dan Pemberdayaan* (Yogyakarta : Aditya Media, 1995), hal. 34-35

Pertama, pemberdayaan masyarakat merupakan prasyarat mutlak bagi upaya penanggulangan masalah kemiskinan. Pemberdayaan ini bertujuan menekan perasaan ketidakberdayaan (impotensi) masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial politis. Langkah konkritnya adalah meningkatkan kesadaran kritis atas posisinya dalam struktur sosial – politik dimana orang miskin tersebut tinggal. Tanpa kesadaran kritis orang miskin akan tetap bersifat tidak berdaya dan cenderung akan menyerah pada nasibnya.

Kedua, setelah kesadaran kritis muncul, upaya-upaya memutuskan hubungan-hubungan yang bersifat eksploitatif (pendayagunaan) terhadap lapisan orang miskin perlu dilakukan. Pemutusan hubungan itu dapat dilakukan bila terjadi reformasi sosial, budaya dan politik. Artinya biarkan kesadaran kritis orang miskin muncul dan bersamaan itu biarkan pula melakukan reorganisasian dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas hidupnya.

Ketiga, menanamkan rasa kesamaan (egalitarian) dan memberikan gambaran bahwa kemiskinan bukan merupakan takdir tetapi sebagai penjelmaan konstruksi sosial. Nasib orang miskin bukannya tidak dapat diubah tetapi dapat diubah dan mempunyai kekuatan untuk merubah adalah diri sendiri. Artinya Tuhan melahirkan setiap umatnya di dunia dalam keadaan yang sama. Kemiskinan dan ketimpangan bukan produk masyarakat itu sendiri (*the social construction*).

Keempat, merealisasikan perumusan pembangunan dengan melibatkan masyarakat miskin secara penuh. Sebagai contoh, bagaimana merealisasikan proyek kawasan terpadu (PKT) dengan merumuskan utama proyek itu adalah lapisan

miskin. Ini hanya bisa tercapai kalau komunikasi politik antara pemegang kekuasaan, kelompok-kelompok dan person-person strategis, dan masyarakat miskin tidak mengalami distorsi. Apabila komunikasi politik distorsi maka rumusan pembangunan hanya mencerminkan kepentingan bukan lapisan miskin.

Kelima, perlunya pembangunan sosial dan budaya bagi masyarakat miskin. Selain perubahan struktur yang diperlukan juga perubahan nilai-nilai positif kepada lapisan miskin seperti perencanaan hidup, optimisme, perubahan kebiasaan hidup, peningkatan produktivitas kerja dan kualitasnya dan lain-lain.

Keenam, diperlukan redistribusi infrastruktur pembangunan yang lebih merata. Meskipun keempat langkah diatas dapat dipenuhi tanpa dukungan infrastruktur yang memadai orang miskin tetap saja memperoleh akses ekonomi yang akibatnya tidak memiliki juga akses kebidang-bidang lainnya.

Apabila langkah-langkah itu dapat dilaksanakan secara terpadu maka kemiskinan dapat ditanggulangi, dan apabila kemiskinan dapat ditanggulangi maka ketimpangan akan surut pula. Langkah-langkah diatas merupakan gambaran bahwa antara deregulasi ekonomi dan deregulasi politik tidak dapat dipisahkan.

b. Dimensi-dimensi Kemiskinan

Kemiskinan bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi tetapi bersifat multidimensional karena dalam kenyataannya juga berurusan dengan persoalan-persoalan non – ekonomi (sosial, budaya, dan politik). Karena sifat multidimensial tersebut maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan kesejahteraan sosial. Untuk mengejar seberapa jauh seseorang memerlukan

kesejahteraan materi dapat diukur secara kuantitatif dan obyektif seperti dalam mengukur kemiskinan absolut yaitu ditunjukkan dengan angka rupiah. Namun untuk memahami beberapa besar kesejahteraan sosial yang harus dipenuhi seseorang ukurannya menjadi sangat relatif dan kualitatif. Dalam butir ini yang dipersoalkan bukan berapa besar ukuran kemiskinan tetapi dimensi-dimensi apa saja yang terkait dalam gejala kemiskinan.

Pertama, yang paling jelas bahwa kemiskinan berdimensi ekonomi atau material. Dimensi ini menjelma dalam berbagai kebutuhan dasar manusia yang sifatnya material yaitu seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan lain-lain. Dimensi ini dapat diukur dalam rupiah meskipun harganya akan selalu berubah-ubah setiap tahunnya tergantung dari tingkat inflasi rupiah itu sendiri.

Kedua, kemiskinan berdimensi sosial dan budaya. Ukuran kuantitatif kurang dapat dipergunakan untuk memahami dimensi ini sehingga ukuran sangat bersifat kualitatif. Lapisan yang secara ekonomis miskin akan membentuk kantong-kantong kebudayaan yang disebut budaya kemiskinan demi kelangsungan hidup. Budaya kemiskinan ini dapat ditunjukkan dengan terlembaganya nilai-nilai seperti apatis, apolitis, fatalistik, ketidakberdayaan dan lain-lain. Untuk itu serangan terhadap kemiskinan sama artinya pula dengan pengikisan budaya ini. Apabila budaya ini tidak dihilangkan maka kemiskinan ekonomik juga sulit ditanggulangi.

Ketiga, kemiskinan berdimensi struktural atau politik artinya orang yang mengalami kemiskinan ekonomi pada hakekatnya karena mengalami kemiskinan struktural atau politis. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tersebut tidak

memiliki sarana untuk terlibat dalam poros politik, tidak memiliki kekuatan politik, sehingga menduduki struktural sosial paling bawah. Ada asumsi yang menegaskan bahwa orang yang miskin secara struktural atau politis akan berakibat pula miskin alam material (ekonomi). Untuk itu langkah pengentasan kemiskinan apabila ingin efektif juga harus mengatasi hambatan-hambatan yang sifatnya struktural dan politis.¹⁴

Dimensi-dimensi kemiskinan ini pada hakekatnya merupakan gambaran bahwa kemiskinan bukan hanya dalam artian ekonomi, tetapi memperhatikan prioritas, namun bersamaan dengan itu seyogyanya juga mengejar target mengatasi kemiskinan non-ekonomi. Ini sejalan dengan pergeseran strategi pembangunan nasional, bahwa yang dikejar bukan hanya semata-mata pertumbuhan ekonomi tetapi juga pembangunan kualitas manusia seutuhnya (sosial, budaya dan politik).

Menurut Sunyoto, kemiskinan terdiri dari perspektif kultural, mendekati masalah kemiskinan pada tingkatan analisis: individual, keluarga dan masyarakat. Pada tingkat individual, kemiskian ditandai dengan sifat yang lazim disebut *strong feeling of marginality* seperti : sikap parokral, apatisme, fatalisme atas pasrah pada nasib, boros, tergantung dan inferior. Pada tingkat keluarga, kemiskinan ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar dan *Free Union or Consensual*. Dan pada tingkat masyarakat, kemiskinan terutama oleh

¹⁴ *Ibid.*, hal. 31-32

tidak terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat secara efektif.¹⁵

Pada sisi lain, kaum kulturalis menganggap bahwa kemiskinan bersumber dari budaya tertentu yang mengakibatkan orang menjadi fatalis dan malas. Akibat dari pandangan itu, proyek pengentasan kemiskinan atau pemberdayaan masyarakat miskin hanya sebatas pada upaya perbaikan kondisi ekonomi (peningkatan pendapatan) dan perubahan budaya melalui proyek-proyek pelatihan kerja kelompok miskin agar mampu meningkatkan produktivitas. Sedikit dari para ahli pembangunan yang memahami bahwa problema kemiskinan juga bersumber dari tata politik yang timpang. Tanpa adanya pemberdayaan politik bagi kelompok miskin, mekanisme tetesan kebawah yang selama ini diharapkan menyertai pertumbuhan ekonomi akan tetap saja tinggal sebagai harapan.

Mengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya pemberdayaan orang miskin untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, budaya dan politik. Kemiskinan merupakan problem multidimensional yang penanggulangannya tidak dapat hanya dengan pemberdayaan ekonomi. Pemberdayaan politik bagi lapisan miskin merupakan sesuatu yang tidak dapat terelakkan kalau pemerataan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial yang dikehendaki. Lapisan masyarakat miskin pada dasarnya merupakan lapisan yang mempunyai potensi politik, tetapi karena berbagai hal suara kelompok ini terpendam dalam struktur politik. Agar dapat

¹⁵ Sunyoto Usman, *op. cit.*, hal. 128

lari dari problema kemiskinan maka pemberdayaan politik diperlukan sehingga masyarakat miskin dapat mampu bersuara dalam struktur politik tersebut. Semakin tinggi akses politis yang tinggi pula akses ekonomi yang dimiliki, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat mengentas dirinya sendiri dari problem kemiskinan yang dihadapi.

3. Berbagai Sarana Untuk Mengentaskan Kemiskinan

Kemiskinan telah menciptakan ketidakberdayaan dalam berbagai kehidupan manusia, sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan dan bahaya dan tidak ada faktor penyebab tunggal dalam kemiskinan. Karena itu penanggulangannya juga tidak dapat dilakukan dengan pendekatan yang tunggal, diperlukan adanya pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan dari berbagai aspek kehidupan.¹⁶

Dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan Andree Bayo mengungkapkan dalam bukunya “Beberapa Pendekatan dan Strategi Memerangi Kemiskinan” sebagai berikut:

Teori-teori pendekatan, strategi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang pernah dan sedang digunakan dalam pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan:

1. Pertumbuhan dan Pemerataan

Peningkatan pembangunan memungkinkan pemerataan hasil-hasil pembangunan lebih luas sehingga bisa menjangkau kelompok penduduk berpendapatan rendah. Proses pemerataan pembangunan ini bisa dipercepat

¹⁶ Musa Asy'ari, *Islam, Etos Kerja dan Pembangunan Ekonomi Umat* (Yogyakarta: LESFI 1997),hal.129

dengan diterapkan kebijaksanaan perpajakan dan subsidi yang mengalihkan sebagian hasil pendapatan kaum kaya kepada kelompok miskin. Maka secara teoritis, kebijaksanaan pembangunan serupa ini akan mencapai pemerataan pembangunan yang akhirnya menjangkau penduduk miskin.

Bintoro dkk mengatakan bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi itu sendiri tidak mampu memecahkan masalah kemiskinan di negara-negara yang sedang berkembang, malahan memperlebar jurang perbedaan antara kaya dan miskin.

Teori Trickle Down Effects dari pembangunan yang diterapkan di negara-negara sedang berkembang ternyata tidak berhasil memecahkan masalah kemiskinan dan kepincangan pembagian pendapatan semakin besar. Oleh karena itu, lahirlah gagasan baru yang mengusahakan pembangunan dan pemerataan hasil pembangunan yang berkeadilan (*growth with justice*). Dalam menanggulangi kemiskinan akhir-akhir ini telah lahir pula gagasan baru yang mengusahakan pembangunan dan pemerataan yang lebih berani dan lebih maju melihat pemerataan sebagai kegiatan yang harus mendahului pembangunan. Jika bank dunia mengatakan *Redistribution of growth*, dimana pembangunan dan pemerataan haruslah berjalan seiring, maka Irma Adilman mengungkapkan *Redistribution growth* pemerataan dahulu kemudian pembangunan, menurutnya pemerataan hasil pembangunan sangat tergantung pada penguasaan faktor-faktor produksi penting (*critical assets of production*), sehingga diperlukan redistribusi aset-aset produksi sebelum proses pembangunan dimulai. Dalam hubungan ini, usaha Landre Form dan

penyebaran pendidikan untuk pembentukan modal manusia (*human capital*) menjadi sangat penting. Dengan adanya pemerataan aset-aset produksi, terutama di kalangan penduduk miskin, maka dapat diharapkan pendobrakan keadaan bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.¹⁷

2. Pendekatan Kebutuhan Dasar (*basic needs approach*)

Pendekatan kebutuhan dasar merupakan serangan langsung terhadap kemiskinan dan kepincangan pembagian pendapatan. Gagasan pembangunan dengan pemerataan, lebih diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pokok (*basic need*) bagi penduduk miskin. Serangan langsung tersebut menurut Bintoro dan Mustofa Didjaya, mempunyai dua kelompok sasaran pokok yakni: pertama, mencukupi kebutuhan rumah tangga kedua, mencukupi sarana dasar kehidupan masyarakat luas seperti air minum, sanitasi, angkutan umum, kesehatan serta fasilitas pendidikan dan kebudayaan.¹⁸

Berkaitan dengan strategi kebutuhan pokok, Mahfud Ulhaq mengatakan bahwa salah satu tema dalam strategi pembangunan yang paling disenangi oleh perancang pembangunan dan penyusunan kebijaksanaan adalah konsep kebutuhan manusia. Sekarang pada umumnya diterima bahwa dalam masyarakat miskin perencanaan produksi pada permulaan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar manusia bank dunia mengemukakan beberapa usaha untuk mengentaskan kemiskinan:

¹⁷ Andree Bayo Ala, *Beberapa Pendekatan dan Strategi Memerangi Kemiskinan* (Yogyakarta: Akademi, 1985), hal. 40

¹⁸ *Ibid.*, hal. 41

1. Menaikkan pendapatan kaum miskin
2. Pendidikan bagi kaum miskin
3. Peningkatan kesehatan kaum miskin
4. Meningkatkan gizi kaum miskin
5. Mengurangi fertilitas dengan KB, Insertile dan lain sebagainya.¹⁹

3. Pendekatan Publik (*Public Approach*)

Teodore W. Schultz mengajukan suatu pendekatan publik untuk mengentaskan kemiskinan antara lain:

- a. Meningkatkan upah dan harga hasil-hasil pertanian melalui peraturan perundang-undangan untuk menetapkan upah minimum dan menaikkan upah para buruh tidak terampil, serta menetapkan harga minimum dan menaikkan harga hasil pertanian dari para petani. Hal itu merupakan salah satu cara langsung dan efektif untuk mengurangi kemiskinan dan dapat meningkatkan pendapatan kaum miskin.
- b. Pajak progresif
Pajak progresif digunakan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara kaya dan miskin. Semakin besar kekayaan seseorang, maka semakin besar pula pajak yang dikenakan kepadanya.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 43-45

c. Kesempatan kerja

Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan perluasan kesempatan kerja, sehingga lebih banyak orang terserap dalam lapangan kerja. Dengan demikian, akan mengurangi pengangguran yang merupakan salah satu wajah atau aspek kemiskinan.

d. Investasi publik bagi kaum miskin

Dalam rangka mengurangi kemiskinan, diperlukan investasi kaum miskin yakni orang-orang miskin dididik dan dilatih menjadi tenaga-tenaga terampil siap pakai sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses produksi.²⁰

4. Pendekatan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Teori ini dianggap kunci pokok pembangunan yang dapat menjamin kemajuan pokok ekonomi dan kestabilan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi prioritas kepada usaha peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan gizi.

Hal ini akan menumbuhkan inisiatif dan sikap kewiraswastaan, maka akan tumbuh pula lapangan kerja baru sehingga produktifitas nasional akan meningkat, baru peranan modal dan teknologi yang sesuai mempunyai manfaat besar. Selain itu, perlu pula ditingkatkan daya juang atau semangat juang yang tinggi untuk menentang kemiskinan melalui motivasi. Orang miskin dimotivasi untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan.

²⁰ *Ibid.*, hal. 48-49

Emil Salim mengatakan bahwa ikhtisar perombakan lingkaran setan kemiskinan bisa efektif apabila campur tangan luar berhasil menanamkan benih perubahan dalam kalbu penduduk miskin itu sendiri.²¹

5. Pendekatan Struktural

Menurut John Friedman cara untuk mengatasi kemiskinan struktural adalah dengan jalan *impowermant of the poor* yaitu dengan mengadakan pendekatan kolektif untuk memperoleh atau memenuhi kebutuhan dan pribadi dan anggota lain. Usaha untuk memberantas kemiskinan dilakukan dengan cara memberikan kesempatan lebih besar kepada kaum miskin untuk mencapai kekuasaan melalui organisasi sosial dan politik yang dapat membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan.²²

6. Pendekatan Anti Kemiskinan

Kerangka kerja kebijaksanaan pemberantasan kemiskinan dan pencapaian pemerataan pendapatan serta kekayaan yang adil dan merata sebagai berikut:

a. Pemberdayaan usaha yang produktif

Usaha produktif harus diberdayakan ke arah kewajiban moral, dan hasil dari usaha produktif tersebut dilukiskan sebagai karunia Tuhan.

Sehingga dengan pengertian itu maka penghasilan hidup seseorang yang diperoleh melalui cara yang jujur juga dipandang sebagai bentuk dari peribadatan dalam Islam.

²¹ Emil Salim, *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan* (Jakarta: Yayasan Indayau, 1996), hal. 7

²² Andree Bayo, *op.cit.*, hal. 58

b. Kesempatan yang adil

Salah satu hak dasar ekonomi adalah setiap individu harus memiliki kesempatan untuk mengembangkan kecakapan pembawaan sejak lahir sepenuhnya dan memilih profesi yang sesuai dengan bakatnya. Islam juga menentang adanya stratifikasi sosial, karena hal itu akan mengekalkan ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan. Komitmen Islam terhadap keadilan sosial menggarisbawahi penekanan yang tegas pada kesempatan yang sama.²³

c. Pemberdayaan sukarela bagi kesejahteraan fakir miskin

Menurut ajaran Islam, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh manusia yang kaya untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka bagi kesejahteraan fakir miskin, dan pemberian tersebut tanpa mengharapkan imbalan atau ganjaran tertentu di dunia melainkan semata-mata untuk memperoleh keridhoan Tuhan dan menimbulkan rasa malu dari mereka yang mendapat bantuan serta tidak seharusnya diikuti dengan peringatan (ancaman) tertentu pada penerima.²⁴

d. Sistem jaminan sosial

Ajaran Islam membebani negara dengan tanggung jawab pokok untuk menjamin tingkat kehidupan minimum bagi seluruh warga negara, dan secara moral mendorong kaum kaya membelanjakan uang untuk kesejahteraan kaum miskin. Manusia diperintahkan untuk memperlihatkan perhatian yang khusus terhadap kerabat yang miskin.

²³ Ziaddin Ahmad, *Al Qur'an Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan* (Cet. I; Yogyakarta: Dana Bhakti Yasa, 1998), hal. 16-17

²⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 1989), hal. 66

4. Sarana Pengentasan Kemiskinan

Islam memaklumkan perang melawan kemiskinan demi keselamatan aqidah, moral dan akhlaq manusia, langkah ini diambil untuk melindungi keluarga dan masyarakat serta menjamin keharmonisan dan persaudaraan diantara anggotanya.

Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah masyarakat secara layak sebagai manusia. Sekurang-kurangnya, dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup. Dalam hal ini sarana-sarana untuk menghapuskan kemiskinan adalah sebagai berikut :

1. Bekerja

Yang dimaksud dengan bekerja adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang, baik sendiri atau bersama orang lain, untuk memproduksi suatu komoditi atau memberikan jasa²⁵

Dalam ajaran Islam, semua orang dituntut untuk bekerja menyebar di muka bumi, dan memanfaatkan rezeki pemberian Allah.

Firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al – Mulk ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ط
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

²⁵ Yusuf al Qordhowi, *op.cit.*, hal. 51

Artinya : Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.²⁶

Undang-Undang Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa

“Tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”²⁷

2. Zakat

Islam mempunyai cara tersendiri dalam mengatasi kemiskinan tersebut diantaranya adalah dengan memberi zakat, memberi infak dan shodaqoh terhadap orang miskin. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keempat, dan Allah telah menetapkan hukum wajibnya, bagi orang Islam yang telah mampu membayarnya.

Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.²⁸ Apabila umat Islam benar-benar melaksanakan perintah zakat tersebut maka diharapkan kemiskinan akan segera teratasi. Zakat di samping untuk memberi bantuan terhadap fakir miskin juga dapat berfungsi sebagai alat untuk membersihkan diri dari penyakit kikir dan serakah serta sifat-sifat rendah dan kejam terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak punya dan sifat-sifat lainnya.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Penerbit CV. Diponegoro, 2000), hal. 449

²⁷ Tim Depdagri Pusat, *op.cit.*, hal. 7

²⁸ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunah*, diterj. Mahyudin Syaf dengan judul *Fiqih Sunah*, (Cet.x; Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1996), hal.5

Di samping itu zakat juga mensucikan jiwa, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berkah dan kebajikan, baik dari segi moral maupun amal, hingga dengan demikian ia layak mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.²⁹

Dengan demikian betapa besarnya faedah zakat bagi orang yang membayarnya maupun bagi fakir miskin yang menerimanya. Bagi orang yang membayar zakat mereka dapat terhapus sifat kikir maupun menjadi bersih jiwanya dari sifat serakah sedangkan bagi yang menerima zakat dapat membantu kesusahannya yaitu kemiskinan. Atas dasar itulah kiranya sangat cocok sekali bahwa zakat adalah merupakan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan.

Ada beberapa kewajiban keuangan selain zakat yang harus dipenuhi seorang muslim.³⁰ Semuanya merupakan sumber bantuan bagi kaum papa yang dapat menghapuskan kemiskinan seperti : hak tetangga, berkorban pada Hari Raya Qurban, denda karena melanggar sumpah, tebusan zhihar, fidyah, denda haji, hak orang miskin dari hasil pertanian, kewajiban melengkapi kebutuhan fakir miskin.

3. Shodaqoh atau sedekah sukarela dan kemurahan hati individu

Islam tidak menetapkan berbagai kewajiban dan ketentuan di kalangan pengikutnya. Ia pun berupaya menciptakan jiwa yang bersih dan, pemurah, dan penyantun. Kepada umatnya ia mengajarkan kerelaan untuk memberikan lebih dari permintaan, melaksanakan kewajiban lebih

²⁹ *Ibid*, Hal: 7

³⁰ Yusuf Al- Qordhowi, *op.cit.*, hal. 147

dari tuntutan, mengulurkan tangan tanpa diminta, dengan sembunyi maupun terang-terangan.

Di dalam bukunya Muhammad Daud Ali juga disebutkan shodaqoh adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin, setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya.³¹

Islam dalam kedudukannya sebagai agama, sangat menaruh perhatian terhadap sektor moral yang penting ini. Ia tidak cukup hanya sekedar memberikan jaminan hak-hak yang diatur oleh perundang-undangan, yang pelaksanaannya ditangani oleh aparat pemerintah, sektor ini menurut pandangan Islam, bukan semata-mata merupakan sarana terwujudnya gotong-royong antara sesama manusia saja, tetapi lebih dari itu juga merupakan titik final bagi tujuan Islam dalam membina insan yang sholeh, yang semata-mata mengharap ridho Allah dan ingin hidup berdampingan dengan para nabi di surga-surga mereka kelak, kendati penanggulangan kemiskinan telah dapat diwujudkan.³²

Disamping itu Islam bertekad menyelamatkan dan mengangkat mereka dari lembah kemiskinan serta mencegah dari tindakan mengemis dan meminta-minta. Dalam kaitan ini Islam membuat peraturan yang berkaitan dengan solidaritas antar anggota keluarga. Islam menjadikan seluruh karib kerabat saling menopang dan menunjang yang kuat

³¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf* (Cet. I; Jakarta: UI Press, 1988), hal: 23

³² Yusuf al- Qordhowi, diterj. Oleh Umar Fanany *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Cet. III; Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), hal. 210

menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin dan yang mampu mengulurkan tangan kepada yang tidak mampu³³

Oleh karena itu sangatlah tepat jika shodaqoh atau sedekah dijadikan alat untuk membantu fakir miskin atau yang tidak mampu untuk memperbaiki kehidupannya. Begitulah Islam menganjurkan agar umatnya senang bershodaqoh, karena disamping shodaqoh merupakan kewajiban bagi yang telah mampu atau kelebihan harta, shodaqoh juga berfungsi sebagai sarana untuk menopang bagi kaum fakir miskin untuk hidup dengan layak dan berkecukupan.

Dalam pemberian shodaqoh, Islam tidak menentukan besar sumbangan yang diharuskan untuk karib kerabat. Sebab, kebutuhan orang berbeda-beda sesuai dengan tempat, waktu, kondisi, dan situasi. Selain itu berbeda pula kondisi dan kemampuan si pemberi. Ada yang kaya dan ada yang sedang-sedang. Islam memperhatikan keseimbangan antara kemampuan si pemberi dan kebutuhan si penerima. Diharapkan pemberian itu dapat menutupi kebutuhan yang pantas. Yang dimaksud dengan pantas adalah apa yang telah ditetapkan oleh naluri yang sehat pikiran yang rasional dan kebiasaan yang mulia.³⁴

4. Jasa Simpan Pinjam

Kalau kita menoleh sejenak akan hukum rejeki maka kita akan berjumpa dengan suatu dalil bahwa rejeki akan datang disaat Allah memberi dan bukan disaat kita meminta. Saat Allah itulah kunci intinya,

³³ *Ibid*, hal. 83

³⁴ *Ibid*, hal. 83

maka yang paling utama adalah bagaimana mengaturnya. Namun manusia bukanlah makhluk yang paling sempurna ada kebutuhan yang mendadak dan perlu ditangani segera. Di sinilah arti mencari hutang atau kredit demi kebutuhan manusia menjadi suatu hal yang penting. Untuk inilah maka pendirian BMT merupakan suatu langkah strategis dalam memberdayakan masyarakat miskin, utamanya untuk menjamin agar anggota yang bersangkutan tidak terjebak pada praktek lintah darat.

Pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam adalah strategis dalam rangka pemupukan dan pendayagunaan uang serta modal umat Islam.³⁵ Sehingga uang tersebut dapat dijadikan modal usaha kongkrit yang diarahkan langsung kepada sasaran utama, suatu *direct attack on poverty*, menunjang program pemerataan pemerintah dalam memerangi kemiskinan.³⁶

Selain zakat, infaq, dan shodaqoh sebagai sarana mengentaskan kemiskinan yaitu jasa simpan pinjam (*Bait al- Tamwil*) yaitu menghimpun dana masyarakat kemudian digunakan untuk pembiayaan produktif anggota. Kegiatan simpan pinjam khususnya simpanan (tabungan) yang meliputi simpanan mudhorobah, simpanan pendidikan, simpanan walimahan, simpanan qurban/aqiqoh, simpanan amanah dan simpanan haji. Kegiatan yang lainnya yaitu pembiayaan (pinjaman) meliputi pembiayaan musyarokah (kongsi bagi hasil), pembiayaan murobahah (jual beli angsuran) dan pembiayaan *Qordhul Hasan*.

³⁵ Sri Edi Swasono, *Memerangi Kemiskinan Perekonomian Umat*, (Solo: Yayasan S.J. Hanum, 1984), hal.9

³⁶ *Ibid.*

Didalam pengambilan kredit tidak perlu besar, yang utama adalah bagaimana kredit itu efektif, lancar, dan merata serta menjawab kebutuhan masyarakat sekitar. Sehingga dengan adanya jasa simpan pinjam dapat memberi kemudahan terhadap masyarakat miskin untuk mengambil pinjaman modal dan dapat merubah kehidupannya yang lebih baik.

G. Metode Penelitian

1. Subyek dan Obyek Penelitian

Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah :

- a. Pengurus BMT
- b. Anggota BMT

Dalam penentuan sumber-sumber informasi di atas dilaksanakan dengan sengaja yaitu pemilihan yang dilakukan berdasarkan pada kedudukan informan dalam BMT Al Barokah Padi Melati tersebut sehingga diharapkan akan memperoleh data yang lengkap.

Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan pemberdayaan BMT melalui program pengentasan kemiskinan yang berupa : jasa keuangan simpan pinjam, penghimpunan zakat, infaq dan shodaqoh.

2. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari obyek penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode Wawancara adalah suatu proses tanya jawab secara lisan, dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain mendengarkan dari telinganya sendiri.³⁷

Metode Wawancara ini ditujukan kepada pengurus BMT Barokah Padi Melati dan para nasabah yang mendapat jasa dari BMT Barokah Padi Melati untuk mengungkap data tentang usaha-usaha dari BMT Barokah Padi Melati dalam rangka memberdayakan Masyarakat Miskin di Wirobrajan, dengan beberapa pengurus antara lain Nur Rokhayati selaku Manajer, Istyawati selaku Kabid Unit Simpan Pinjam, Fatmawati selaku anggota Unit Sosial atau Maal dan para Nasabah BMT Barokah Padi Melati

Metode Wawancara ini juga digunakan untuk mengungkap data tentang pembinaan terhadap para nasabah serta syarat untuk memperoleh jasa dari lembaga tersebut, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam usaha-usaha BMT Barokah Padi Melati.

Adapun dalam pelaksanaannya penulis menggunakan wawancara bebas dan terpimpin, artinya dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.³⁸

³⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Research I dan II* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit FIP UGM, 1989), hal. 132

³⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar* (Jakarta: Bina Aksara, 1989) hal. 127-128

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengamatan dengan sistematis dengan fenomena yang diselidiki.³⁹

Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan dari dekat terhadap hal-hal yang ada hubungannya dengan persoalan yang akan diteliti. Penulis menggunakan cara pengamatan ini secara tidak langsung, artinya penulis tidak terlibat dalam kegiatan atau obyek yang sedang diteliti atau dalam hal ini peneliti tidak ikut berpartisipasi dalam obyek penelitian.

Metode ini digunakan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan kegiatan –kegiatan yang dilakukan oleh BMT Barokah Padi Melati.

Dalam penelitian ini observasi berfungsi untuk mengecek data yang telah diperoleh BMT Barokah Padi Melati.

c. Metode Dokumentasi

Dalam rangka menunjang kedua metode tersebut di atas, penulis memandang perlu menetapkan metode khusus yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang bersifat dokumenter. Maksud dari metode ini adalah penyelidikan yang ditujukan pada penguraian terhadap apa yang telah lalu, melalui sumber-sumber dokumentasi.⁴⁰

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data hasil pelaksanaan kegiatan –kegiatan yang dilakukan oleh BMT Barokah Padi melati, serta data-data lain yang berkaitan dengan apa yang diteliti, seperti

³⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas UGM, 1987), hal. 206

⁴⁰ Nur Syam, *Metodologi Penelitian Dakwah* (Solo : Ramadani,1991),hal.111

data mengenai latar belakang masalah dan perkembangannya dari BMT Barokah Padi Melati, struktur organisasi dan manajemen dari BMT Barokah Padi Melati.

Adapun data yang di peroleh di lapangan dapat berupa arsip-arsip, buku tentang sejarah berdirinya lembaga ini dan inventarisasi yang lainnya.

3. Metode Analisa Data

Untuk mengolah data yang diperoleh dari hasil penelitian ini, penulis menggunakan tehnik analisa deskriptif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang dikumpulkan ,disusun,dijelaskan dan kemudian di analisa.⁴¹

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Disebut deskriptif karena bersifat menjelaskan,menerangkan atau menggambarkan suatu peristiwa disebut kualitatif karena data yang dihasilkan dari penelitian ini tidak dalam bentuk angka. Penelitian kualitatif berkenaan dengan data kualitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menyusun dan menganalisa data berdasarkan apa adanya, kemudian memberikan interpretasi agar mudah di pahami dengan cara menerangkan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

⁴¹ Winarno Surakhmad,*Metode Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsitu, 1987),hal. 140



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Di sini terlihat BMT Barokah Padi Melati di dalam memberdayakan masyarakat miskin di kecamatan Wirobrajan, yaitu dengan membantu mengembangkan sumber daya manusia dan peluang kerja bagi warga masyarakat. Untuk dapat meningkatkan perekonomian dengan usaha-usaha yang mereka jalankan, yaitu dengan unit-unit kegiatan yang ada dibawah naungan BMT Barokah padi Melati seperti : Unit Simpan Pinjam dalam rangka melaksanakan fungsi sebagai koperasi kredit dengan menerapkan sistem Syariah Islam yang bebas bunga. Kedua fungsi tersebut secara simultan merupakan proses pemberdayaan masyarakat miskin yang berkelanjutan dan ikut serta membantu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

BMT Barokah Padi Melati sebagai lembaga jasa keuangan Islam yang memberikan alternatif simpan-pinjam bebas riba dalam mengangkat perekonomian pengusaha-pengusaha kecil di wilayah kecamatan Wirobrajan dengan menggunakan sistem Syariah Islam.

Ada beberapa jenis kegiatan dimana BMT Barokah Padi Melati dapat meningkatkan peranannya seperti simpanan Mudhorobah, Simpanan pendidikan, dan Pembiayaan Musyarokah, Pembiayaan Qordhul Hasan dan Murobahah yang semakin meningkat nasabahnya dari tahun ketahun.

Sedangkan unit pemberi pinjaman *Qordhul Hasan* dan Beasiswa Pendidikan untuk anak yatim dan fakir miskin adalah BMT Barokah Padi Melati dalam melaksanakan fungsi-fungsi sesuai non-profit yang mengacu pada kepentingan umum sebagai fungsi *Baitul Maal* yang menghimpun Zakat, Infaq Shodaqoh.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan, antara lain :

1. Sebagai lembaga keuangan Islam yang mempunyai peran strategis dalam melakukan upaya-upaya terobosan yang kreatif dan inovatif, terutama dalam memberdayakan umat. Oleh karena itu penyempurnaan keorganisasian terutama dalam bidang manajemen harus ditingkatkan, sehingga menjadi lembaga yang profesional serta lembaga ini harus bekerja secara terus menerus untuk mewujudkan tekad bersama.
2. Bagi nasabah yang telah memperoleh bantuan dari BMT Barokah Padi Melati diharapkan untuk memegang amanah tentang akad yang dibuat bersama sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak.
3. Mengembangkan kegiatan yang bersifat *social oriented* khususnya dalam pembiayaan *Qordhul Hasan* agar dana yang berasal dari Zakat, Infaq dan Shodaqoh agar dapat dimanfaatkan dengan optimal.

4. Bagi umat islam yang mampu agar mereka memberikan hak-hak anak yatim dan fakir miskin secara ikhlas, sehingga mampu menghapuskan kesenjangan dan menumbuhkan ukhuwah islamiyah.
5. Memberikan kesempatan yang lebih luas, terutama kepada masyarakat golongan ekonomi lemah untuk memperoleh pinjaman dengan persyaratan yang sederhana.

C. KATA PENUTUP

Rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kendati disadari banyak kekurangan dan kelemahan di dalam skripsi ini, hal ini karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, senantiasa melapangkan jalan bagi penulis untuk melangkah selanjutnya. Amin.

Yogyakarta, Juli 2004

Penyusun



Suciati

99232707

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Ahmad, Ziaddin, *Al Qur'an Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan*, cet. I, Yogyakarta: Dana Bhakti Yasa, 1998.
- Ali Daud, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Cet. I, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI Press) 1998.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian*, Cet. IX, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Asy'ari, Musa, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, Yogyakarta: LESFI, 1997.
- Baswir, Revrison, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan IDEA, 1997.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Cet. I, Yogyakarta, Yayasan Penerbit UGM, 1987.
- Kartasmita Ginanjar, *Power dan Empowermen*; Jakarta Gramedia, 1986.
- Mahfudh Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKIS dan Pustaka Pelajar, 1994.
- Nadzir, Muhammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Poerwadarminto, W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Qordhowi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Rais, M Amin, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunah 3*, Cet.1o Bandung: PT Al – Ma'arif, 1996.
- Salim Emil, *Perencanaan dan Pemerataan Pendapatan*, Jakarta: Yayasan Idayau, 1996.

Sumodiningrat Gunawan, *Pemberdayaan dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Usman Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Widjaja.A.W, *Manusia Individu dan Masyarakat Topik-topik Kumpulan Bahan Bacaan Mata Kuliah Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Akademika Presindo, 1986